



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 14

► MENARA TELEKOMUNIKASI

Raperda Batal Disahkan Jelang Paripurna

UMBULHARJO—Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik batal disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Senin (20/3). Keputusan pembatalan diambil beberapa saat sebelum sidang paripurna dimulai.

"Disepakati pengesahan ditunda dan akan diagendakan lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, Ririk Banowati, saat memimpin sidang.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menyampaikan alasan penundaan itu berdasarkan kesepakatan dari sejumlah fraksi karena melihat di lapangan masih banyak menara telekomunikasi yang belum ditertibkan. Ia khawatir menara yang masih berdiri tegak saat ini akan dianggap sebagai menara eksisting sehingga bisa lepas dari penertiban.

Dalam paripurna kemarin, Pemerintah Kota Jogja, kata Koko sapaan Sujanarko, memang

menyerahkan data semua menara yang sudah berdiri di Kota Jogja. Jumlahnya sekitar 222 menara. Namun data itu diakuinya tidak dijelaskan lebih lanjut mana yang sudah berizin dan yang belum berizin sehingga jika raperda itu disahkan, keberadaan menara itu nanti bisa dianggap berizin semua.

Tidak hanya itu, Koko melanjutkan data menara berbeda-beda antara Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sehingga perlu ada kejelasan terlebih dahulu.

Koko mengaku tidak ingin kecolongan lagi dalam mengesahkan peraturan daerah, seperti Raperda tentang Pengaturan Reklame. Setelah raperda disahkan hingga saat ini masih banyak reklame yang tidak sesuai zonasi, namun dibiarkan oleh Pemerintah Kota Jogja. Yang bisa justru didorong untuk melengkapi izinnya melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja.

Ia tidak ingin hal itu terjadi. "Jadi harus

ada penertiban dulu. Aksi Pemerintah Kota bagaimana sekarang," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Koko menambahkan Pemerintah Kota Jogja pasti bisa menertibkan menara. Berkaca dari penertiban menara mikrosel yang ada di depan Kantor DPRD Kota Jogja. "Kalau yang depan kantor Dewan saja bisa ditertibkan kenapa yang lain tidak bisa," ujarnya.

Adapun Ketua Pansus Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Agung Damar Kusumandaru justru heran raperda itu batal disahkan. Namun demikian pihaknya menghormati keputusan sidang paripurna dan akan kembali menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo belum bisa memberikan banyak komentar terkait dengan penundaan raperda tersebut. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai persoalan menara. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005